

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah PDI Perjuangan

Berdirinya PDI Perjuangan berawal dari berfusnya 5 partai politik pasca pemilu 1971, yang tergabung dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan. Kelima partai politik itu adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) dan Partai Katolik. Semua partai politik tersebut berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 10 Januari 1973. Berfusnya kelima partai politik tersebut memang tidak lepas dari peranan pemerintah saat itu yang berupaya menjalankan agenda politik memperkecil jumlah partai politik dengan alasan untuk lebih mudah mengendalikan stabilitas politik.

Komposisi partai penyusun yang terdiri dari berbagai latar belakang itu membuat PDI harus mengakomodasi berbagai perbedaan bentuk dan warna politik. Mungkin hal itulah yang membuat PDI rentan terjadinya konflik internal. Konflik dalam tubuh partai politik hasil fusi dengan banyaknya jajaran pimpinan segera terlihat sejak tahun-tahun awal. Dimulai dengan konflik dalam struktur kepemimpinan PDI, kemudian di beberapa daerah juga mulai timbul mosi tidak percaya, serta

rentetan konflik dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat yang kembali terjadi berulang-ulang.

Ragam konflik yang terjadi dalam lima tahun pertama berdirinya PDI pada dasarnya menjadi ciri khas dinamika internal PDI yang berkelanjutan pada waktu-waktu sesudahnya. Di tengah situasi politik nasional yang saat itu terdiri dari 3 ormas sosial politik (orsospol), PDI menjadi satu-satunya partai yang paling sering dilanda konflik internal. Pada satu sisi, demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dikembangkan menjadi daya tarik partai berlambang banteng ini. Namun, di sisi lain kebebasan berpendapat membuat friksi antarkader mudah meledak menjadi konflik terbuka.

Berawal dari Kongres IV PDI pada tanggal 21 – 25 Juli 1993 di Medan, terjadi kekisruhan yang berakibat tidak diakuinya segala keputusan dalam kongres, termasuk terpilihnya Soerjadi sebagai pimpinan DPP PDI. Padahal, saat itu Soerjadi terpilih secara aklamasi. Untuk mengisi kekosongan pimpinan PDI, pemerintah menunjuk Latief Pudjosakti sebagai pimpinan sementara yang bertugas mempersiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.

Hasil KLB di Surabaya memutuskan Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI membuat pemerintah menjadi khawatir. Berbagai analisis ahli politik Soeharto menyetakan bahwa munculnya sosok Megawati akan meradikalisasi suara masyarakat yang sudah jenuh dengan segala stabilitas dan kemapanan Orde Baru. Hal ini pada gilirannya sangat

potensial mengancam stabilitas politik yang sudah dibangun Orde Baru. Pemerintah yang melihat gelagat munculnya anggota keluarga Soekarno di tubuh PDI menyikapi dengan berbagai cara, salah satunya dengan memfasilitasi dan memperbesar konflik yang sedang terjadi antara kubu Megawati dengan kubu Soerjadi maupun di dalam jajaran PDI lainnya.

Terjadinya dualisme PDI menimbulkan berbagai friksi di lapisan bawah, mulai dari demo-demo hingga berbagai aksi penolakan pada tokoh PDI Soerjadi maupun Megawati. Puncaknya pada Kongres di Medan yang digelar kubu Soerjadi pada tahun 1996 yang bertujuan menjatuhkan kepemimpinan Megawati, ketika beberapa orang pimpinan PDI secara terang-terangan mengabaikan kepemimpinan PDI yang saat itu dipegang oleh Megawati Soekarnoputri. Di lain pihak, pendukung dan simpatisan Megawati di berbagai kota mulai bergerak sebagai reaksi dari perlakuan pendukung Soerjadi. Kemarahan pendukung dan simpatisan Megawati di beberapa kota mengundang terjadinya bentrok fisik dengan aparat keamanan, yang atas permintaan kubu Soerjadi memutuskan merebut kantor DPP PDI. Pada peristiwa yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli tersebut, menjadi pengalaman yang paling kelabu dalam sejarah PDI hingga saat ini.

Kondisi tersebut memaksa pemerintah yang akhirnya mulai mengakui keberadaan PDI Megawati secara terbuka pada 16 Juli 1997. Sebagian pendukung PDI menyelenggarakan kongres di Bali pada bulan Oktober 1998 dalam rangka meneguhkan keberadaan mereka yang ingin berdiri sendiri. PDI hasil kongres di Bali yang kemudian diketuai oleh Megawati Soekarnoputri ini akhirnya sepakat

menambahkan kata “Perjuangan” di belakang nama PDI. Pada tanggal 1 Februari 1999, PDI kubu Megawati resmi menjadi PDI Perjuangan dalam bentuk badan hukum. Selain nama, PDI Perjuangan juga mengubah logo kepala banteng dalam segilima menjadi banteng gemuk dalam lingkaran.

Sesuai dengan hasil keputusan kongres ke-5 PDI sebelumnya di Denpasar Bali, maka secara mendasar tidak banyak terjadi perubahan *platform* kecuali lebih konsisten pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kerakyatan. Pondasi politik partai diperkokoh dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru yang menekankan jati diri partai secara lebih terbuka. Disebutkan pula bahwa tujuan umum partai adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong perdamaian dunia, sama dengan pembukaan UUD 1945. Sementara tujuan khususnya adalah memenangkan pemilu agar PDI Perjuangan memiliki sarana mencapai tujuan umumnya.

Kongres pertama PDI Perjuangan yang diselenggarakan di Semarang tahun 2000 menetapkan kepengurusan awal PDI Perjuangan/susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk masa bakti 2000-2005 sebagai berikut:

1. Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
2. Ketua : Drs. Lucas Karl Degey
Drs. Kwik Kian Gie
I Gusti Ngurah Sara
Theo Syafei

- Imam Mundjiat, SH
 Roy BB Janis, SH
 Ir. Arifin Panigoro
 Gunawan Wirosarojo
3. Sekretaris Jenderal : Ir. Sutjipto
4. Wakil Sekretaris Jenderal : Mangara M. Siahaan
 Ir. Pramono Anung, MM
 Drs. Jacobus K. Mayongpadang
 Ir. Agnita Singedekane Irsal
5. Bendahara : Dra. Noviantika Nasution
6. Wakil Bendahara : Johanes Lukman
 Dra. Sri Oetari Ratna Dewi

B. Ideologi (*Platform*) PDI Perjuangan

Sebagai landasan perjuangan partai dalam rangka melaksanakan peran dan fungsinya, maka PDI Perjuangan berusaha untuk selalu selaras dengan ideologi partai, yaitu:

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Melestarikan tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan sebagai negara hukum yang demokratis.

3. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila dengan menggelorakan semangat kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk memperjuangkan nilai-nilai ideologi tersebut, PDI Perjuangan telah berketetapan untuk menjadikan dirinya sebagai sebuah partai *modern* yang tetap mempertahankan jati dirinya sebagai partai kerakyatan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

C. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk masa bakti 2010-2015 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ketua Umum | : Megawati Soekarnoputri |
| 2. Ketua Bidang Kehormatan Partai | : Sidharto Danusubroto |
| 3. Ketua Bidang Politik dan Hubungan
Antarlembaga Negara | : Puan Maharani |
| 4. Ketua Bidang Keanggotaan Kaderisasi
Rekrutmen | : Idham Samawi |
| 5. Ketua Bidang Organisasi | : Djarot Syaiful Hidayat |

6. Ketua Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi : Rano Karno
7. Ketua Bidang Sumber Daya dan Dana : Effendi Simbolon
8. Ketua Bidang Pertanian Perikanan dan Kelautan : Mindo Sianipar
9. Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja : Ribka Tjiptaning
10. Ketua Bidang Industri Perdagangan : Nusyirwan Sujono
11. Ketua Bidang Perempuan dan Anak : Wiryanti Sukamdani
12. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga : Maruarar Sirait
13. Ketua Bidang Infrastruktur dan Perumahan : I Made Urip
14. Ketua Bidang Energi dan Pertambangan dan Lingkungan Hidup : Bambang Wuryanto
15. Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan : Muhammad Prakosa
16. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan : Emir Moeis
17. Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-Undangan : Trimedy Panjaitan
18. Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan dan Hubungan Internasional : Andreas Pareira
19. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah : Komarudin
20. Sekretaris Jenderal : Tjahjo Kumolo
21. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal : Eriko Sotarduga
22. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Program : Ahmad Basarah

- | | |
|---|---------------------------|
| 23. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang
Kesekretariatan | : Hasto Kristianto |
| 24. Bendahara Umum | : Olly Dondokambey |
| 25. Wakil Bendahara Bidang internal | : Rudianto Tjen |
| 26. Wakil Bendahara Bidang program | : Juliari Pieter Batubara |

D. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Lampung

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan adalah pelaksana eksekutif partai di tingkat Provinsi. Berdasarkan Pasal 25 Ayat 3 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, DPD mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan, memantapkan, dan membina partai di wilayah Provinsi.
- b. Memantapkan persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat dan jajaran partai di tingkat Provinsi.
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan dewan perwakilan cabang (DPC) dan kegiatan partai di tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Mengesahkan struktur, komposisi dan personalia pengurus DPC partai di kabupaten/kota.
- e. Melaksanakan program kerja partai di wilayahnya.
- f. Membentuk fraksi dan menetapkan pengurus fraksi DPRD Provinsi.
- g. Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran anggota partai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- h. Menyelenggarakan Konferensi Cabang Partai dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya di dalam Konferensi Cabang Partai.
- i. Memutuskan dengan dan atas persetujuan DPD Partai dan persetujuan DPP Partai untuk menarik kembali petugas partai yang mewakili partai di lembaga negara (Eksekutif dan Legislatif) tingkat Provinsi.
- j. Menetapkan Pengurus Fraksi Partai di DPRD Provinsi.
- k. Menetapkan petugas partai, baik di dalam lembaga negara maupun organisasi lain di tingkat Provinsi.

DPD PDI Perjuangan yang dijadikan lokasi penelitian adalah DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung membawahi 9 DPC di setiap kabupaten/kota. Struktur komposisi dan personalia DPD Provinsi Lampung terdiri atas:

a. Ketua

Satu orang ketua bertugas dan bertanggung jawab atas kinerja partai secara internal dan eksternal di wilayah Kabupaten Pringsewu.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua dibagi menjadi dua, yaitu Wakil Ketua yang bertugas menangani masalah internal partai (Pemenangan Pemilu, Keanggotaan, Organisasi, Kaderisasi, Informasi dan Komunikasi) dan Wakil Ketua yang bertugas menangani masalah eksternal partai sesuai kelompok masyarakat dan sektor kehidupan (Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, Perempuan, Buruh, Tani, dan Nelayan).

c. Sekretaris

Satu orang Sekretaris yang membantu Ketua yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola sistem administrasi dan kelembagaan partai.

d. Wakil Sekretaris

Sekretaris dibantu beberapa orang Wakil Sekretaris. Selain membantu Sekretaris, Wakil Sekretaris bertugas membantu Wakil Ketua yang menangani masalah internal dan eksternal partai di bidang kesekretariatan.

e. Bendahara

Satu orang Bendahara yang membantu Ketua yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan partai.

f. Wakil Bendahara

Bendahara dibantu Wakil Bendahara dalam mengelola sistem keuangan dan perbendaharaan partai.

Struktur komposisi dan personalia DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung disahkan pada tanggal 25 Maret 2010 berdasarkan Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor 12/TAP-DPD/DPP/III/2010 untuk masa bakti 2010-2015 terdiri dari:

1. Ketua : Drs. H. Sjachroedin ZP, SH
2. Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu : Mingrum Gumay, SH.MH
3. Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi : Drs. Tulus Purnomo
4. Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Yanuar Irawan, SE
5. Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi : Ir. Ferdi Gunsan HS
6. Wakil Ketua Bidang Sumber Daya : Erwin Tunggul Setiawa, SH
7. Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan : Watoni Noerdin, SH

8. Wakil Ketua Bidang Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Olahraga : H. Rycko Menoza ZP SE
9. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesra : Hj. Syafariah Widianti, SH
10. Wakil Ketua Bidang Kaum Intelektual dan Profesional : Dadang Sumpena, S.sos
11. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kemasyarakatan : I Komang Koheri, SE
12. Wakil Ketua Bidang Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi : Hi. Darwin Ruslinur
13. Wakil Ketua Bidang Pembangunan Daerah dan Pemerintahan : Ir. Ismayatun
14. Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi : Aprilliati, SH
15. Sekretaris : Dedi Efrizal
16. Wakil Sekretaris Bidang Internal : Galih Priadi SS, S.I.kom
17. Wakil Sekretaris Bidang Eksternal : Hj. Metty Herawati, SH
18. Bendahara : Sudin
19. Wakil Bendahara Bidang Inventarisasi dan Kekayaan Partai : Hj. Yustianingsih, SE